BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
MONITOR BERITA
Hal : 1

O BISNIS INDONESIA
X INVESTOR DAILY
O KOMPAS
O KORAN TEMPO
O MEDIA INDONESIA
O PIKIRAN RAKYAT
O RAKYAT MERDEKA
O REPUBLIKA
O SUARA KARYA
O SUARA PEMBARUAN
O SINAR HARAPAN
O TABLOID KONTAN
O THE JAKARTA POST
O MAJALAH GATRA
O MAJALAH TEMPO
O MAJALAH TRUST
O NERACA
O SEPUTAR INDONESIA
O KORAN KONTAN
O KORAN JAKARTA

KODE : X GAS O BBM O UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

HALAMAN : 9

2019, Pemerintah Rampungkan Perbaikan Infrastruktur Gas

Oleh **Retno Ayuningtyas**

▶ JAKARTA – Pemerintah menargetkan pada 2019 bisa merampungkan perbaikan interkoneksi infrastruktur gas yang menghubungkan sumber dan konsumen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pihaknya tengah menyusun cetak biru pembangunan infrastruktur dan neraca gas bersama seluruh *stakeholder* di Bogor, Jawa Barat. Penyusunan cetak biru tersebut diperlukan lantaran gas merupakan masa depan Indonesia untuk memperoleh energi yang relatif murah dan ramah lingkungan.

"Di Bogor, kami sedang diskusi untuk *blue print* gas nasional, dari alokasi, infrastruktur, kebutuhan gas, agregator gas, hingga *pricing*, semua dibahas," kata dia ketika meninjau sejumlah SPBG di Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut dia, sejumlah wilayah sebenarnya telah memiliki infrastruktur gas yang bisa mengalirkan gas dari sumber hingga konsumen. Sayangnya, setiap infrastruktur ini belum terkoneksi satu sama lain. Dia menginginkan seluruh infrastruktur gas antar pulau atau di dalam pulau harus terhubung sepenuhnya.

"Pemerintah harus kerja keras untuk perbaikan infrastruktur ini. Dalam 4-5 tahun mendatang, konstruksi infrastruktur secara bertahap harus sudah bisa menyambungkan infrastruktur tadi," papar Sudirman.

Dia mengidentifikasi, terdapat lima masalah pemanfaatan gas, yakni terkait regulasi, infrastruktur, pasokan, harga, dan kesiapan masyarakat. Beberapa masalah itu juga menjadi penghambat pengembangan bahan bakar gas (BBG), yakni kesiapan masyarakat dan jaminan pasokan gas.

"Di beberapa tempat, SPBG (stasiun pengisian BBG) sudah selesai tetapi belum bisa operasi karena perizinan dan pasokan gas," ujar dia. Dia berharap masalah ini bisa teratasi begitu perbaikan infrastruktur rampung.

Pemerintah, tegas Sudirman, akan konsisten menerapkan kebijakan konversi ke gas sehingga memberikan kepastian kepada investor. Perbaikan regulasi, seiring dengan perbaikan infrastruktur juga akan dijalankan. Selain itu, pemerintah juga akan serius mengedukasi masyarakat agar tidak takur beralih ke gas.

"Saya optimistis semua ini bisa terjadi, asal dua hal disingkirkan, yakni ego sektoral dan *vested interest*. Kalau pemerintah punya *vested interest*, pasti investor enggan investasi. Kalau pemerintah bersih, stakeholder pasti hampang diajak bicara," jelas dia.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja menambahkan, perubahan neraca gas diperlukan lantaran adanya proyek tambahan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Sebanyak 13 ribu MW dari proyek tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga akan mendongkrak kebutuhan gas. "Kebutuhan gasnya cukup besar dan itu butuh infrastruktur yang masif karena lokasinya tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan," ujar dia.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tutur dia, porsi pasokan gas untuk domestik akan terus diperbanyak. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian kebutuhan harus ditutup dari impor gas alam cair (*liquefied natural gas*/LNG). Bahkan diprediksi impor bisa terjadi lebih cepat dari rencana awal 2019. "Kami sedang hitung kebutuhan impornya. Tapi, bisa jadi akan lebih cepat dari 2019," kata Wiratmaja.